

RINGKASAN

Kebijakan otonomi daerah berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga elemen: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dapat melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada tingkat yang lebih rinci berguna dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah memerlukan alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio keuangan. Berbeda dengan sektor bisnis, hanya ada sedikit ukuran yang dapat digunakan secara luas dalam sektor publik. Di Indonesia, penelitian tentang kinerja keuangan juga masih sedikit dilakukan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah dengan menerapkan rasio keuangan yang dikembangkan ke dalam pemerintahan daerah di Indonesia, berupa rasio likuiditas jangka pendek, rasio likuiditas jangka panjang, rasio efisiensi keuangan, rasio kemandirian keuangan, dan rasio solvabilitas tingkat layanan.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pensinyalan dan teori agensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan masalah yang perlu dipecahkan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif deskriptif. Objek penelitian adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan objek dari rasio keuangan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah LKPD (diaudit) dari 36 pemerintah daerah di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.

Hasil analisis data, untuk rasio likuiditas jangka pendek menunjukkan bahwa Rasio A Provinsi Jawa Tengah adalah 0,62, Rasio B adalah 3,25, dan Rasio C adalah 3,58. Rasio likuiditas jangka pendek tertinggi dari 35 kabupaten/kota adalah dari Kota Magelang dan terendah dari Kabupaten Temanggung. Untuk rasio likuiditas jangka panjang nilai Rasio A, Rasio B, dan Rasio C Provinsi Jawa Tengah adalah 0. Rasio A tertinggi diperoleh Kota Semarang dan Kota Surakarta, Rasio B tidak dapat dihitung, dan Rasio C tertinggi diperoleh Kabupaten Blora. Untuk rasio efisiensi keuangan Provinsi Jawa Tengah Rasio A adalah 1,10, Rasio B adalah 1,89, Rasio C adalah 6,76, dan Rasio D adalah 0,94. Nilai tertinggi masing-masing diperoleh Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Rembang. Untuk rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah Rasio A adalah 0,65 dan Rasio B adalah 0,61. Nilai tertinggi diperoleh Kota Semarang dengan Rasio A 0,36 dan Rasio B 0,38. Untuk rasio solvabilitas tingkat layanan Provinsi Jawa Tengah Rasio A adalah 680.947,68, Rasio B adalah 700.886,34, dan Rasio C adalah 499.038,43. Rasio solvabilitas tingkat layanan tertinggi diperoleh Kota Magelang dan Rasio A terendah diperoleh

Kabupaten Tegal, Rasio B diperoleh Kabupaten Brebes, dan Rasio C diperoleh Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian masa depan dan sebagai bahan informasi untuk masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah yang terkait dalam penelitian ini, hasil penelitian diharapkan menjadi sudut pandang tambahan untuk penilaian kinerja keuangan.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Rasio Likuiditas Jangka Pendek, Rasio Likuiditas Jangka Panjang, Rasio Solvabilitas Tingkat Layanan*

SUMMARY

Regional autonomy policy which are Law 32/2004 and Law 33/2004 expected to create good governance. Good governance characterized by three elements: transparency, participation and accountability. Ways to achieve transparency and accountability is through the presentation of financial statements. Financial statements at a more detailed level are useful in evaluating a government's financial performance. Governments need tools to analyze financial performance of local governments such as financial ratios. Unlike the business sector, there are relatively few established measure that can be broadly used in public sector organizations. In Indonesia, research on the financial performance is also still slightly done. This research tries to analyze the financial performance of local governments in Central Java by implementing financial ratios developed into Indonesia local governments, which are short-term liquidity ratios, long-term liquidity ratios, financial efficiency ratios, financial independency ratios, and service-level solvency ratios.

Theoretical basis used in this research are signaling theory and agency theory. The approach used in this research is a quantitative approach. Based on the problems need to be solved, this research categorized as descriptive quantitative research. The object of the research is about financial ratios used to determine financial performance of local governments, while the object of the ratios is Local Governments Financial Statements (LKPD) in Central Java. The population of the research is LKPD (audited) of 36 local governments in Central Java. Sampling techniques used in this research is purposive sampling.

The results of the data analysis, for the short-term liquidity ratios show that Central Java Province Ratio A is 0.62, Ratio B is 3.25, and Ratio C is 3.58. The highest short-term liquidity ratios of 35 regencies/municipalities are from Magelang City and the lowest are from Temanggung Regency. For the long-term liquidity ratios the value of Ratio A, Ratio B, and Ratio C of Central Java Province are 0. The highest Ratio A was obtained by Semarang and Surakarta City, Ratio B cannot be calculated, and the highest Ratio C was obtained by Blora Regency. For the financial efficiency ratios of Central Java Province Ratio A is 1.10, Ratio B is 1.89, Ratio C is 6.76, and Ratio D is 0.94. The highest value, respectively, was obtained by Kudus Regency, Demak Regency, Brebes Regency, and Rembang Regency. For the financial independency ratios of Central Java Province Ratio A is 0.65 and Ratio B is 0.61. The highest value was obtained by Semarang City with Ratio A of 0.36 and Ratio B of 0.38. For the service-level solvency ratios of Central Java Province Ratio A is 680,947.68, Ratio B is 700,886.34, and Ratio C is 499,038.43. The highest service-level solvency ratios was obtained by Magelang City and the lowest Ratio A was obtained by Tegal Regency, Ratio B was obtained by Brebes Regency, and Ratio C was obtained by Pekalongan Regency.

The results of the research can be used as a reference for future research and as an information material for problems related to the financial performance of local governments. For the related local governments in the research, the results expected to be an additional point of view for the assessment of financial performance.

Keyword : Financial Performance, Financial Ratio, Short Term Liquidity Ratio, Long Term Liquidity Ratio, Service-Level Solvency Ratio